

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA

Sulaeman Masnan¹, Ahmad Nashir²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Sulaeman Masnan

E-mail: sulaemanmasnan@gmail.com

Abstract

The problem of poverty is a multi-dimensional problem, which is difficult to find the right solution to solve. Although since the independence era, the Indonesian government has launched several programs in poverty alleviation from post-independence welfare improvement programs to special poverty reduction programs. Poverty alleviation using a social welfare system model in various countries is known as four system models, which are based on budget allocations, namely; 1) universal model in which the government provides social security to all citizens in an institutional and equitable manner; 2) institutional model, namely social security implemented in an institution where the contribution of the social security scheme comes from three parties (payroll contribution), namely the government, business world and workers; 3) the residual model, namely that social security from the government is prioritized for the weak, such as the poor, disabled and unemployed; and 4) the minimal model, namely the state budget for social programs is very small, only under 10 percent of total state expenditure. In many regions in Indonesia, the government uses the concept of the Prosperous Family Card Program for poverty alleviation. In Sinjai district, the Family Prosperity Card Program has been running in accordance with the procedures established by the Control Team for the Non-Cash Distribution of Social Assistance and is well coordinated by the Village Government and all elements involved starting from the socialization stage to the distribution process which has been carried out in a transparent manner. . This program is very helpful for the poor in fulfilling their daily needs, in order to improve the quality of the community's main nutrition so as to avoid malnutrition.

Keywords: *Poverty, Poverty Alleviation, Prosperous Family Card Program*

Abstrak

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang multi dimensi, yang sulit dicari solusi tepat untuk menyelesaikannya. Meski sejak era kemerdekaan pemerintah Indonesia telah mencanakan beberapa program dalam pengentasan kemiskinan dari program peningkatan kesejahteraan pasca kemerdekaan sampai dengan program khusus penanggulangan kemiskinan. Penanganan kemiskinan dengan model sistem kesejahteraan sosial di berbagai

negara, dikenal empat model sistem, yang didasarkan pada alokasi anggaran yakni; 1) model universal di mana pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata; 2) model institusional, yaitu jaminan sosial dilaksanakan secara lembaga di mana kontribusi skim jaminan sosial berasal dari tiga pihak (payroll contribution), yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja; 3) model residual yaitu jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan pengangguran; dan 4) model minimal, yaitu Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, hanya di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Di banyak daerah di Indonesia, pemerintah menggunakan konsep Program Kartu Keluarga Sejahtera untuk penanganan kemiskinan. Di kabupaten Sinjai, Program Kartu Keluarga Sejahtera telah berjalan dengan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan terkordinasi dengan baik oleh Pemerintah Desa dan seluruh element yang terlibat mulai dari tahap sosialisasi sampai proses pembagian bantuan yang telah dilakukan secara transparan. Program ini sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, guna meningkatkan kualitas gizi utama masyarakat agar terhindar dari malnutrisi.

Kata kunci: *Kemiskinan, Penanganan Kemiskinan, Program Kartu Keluarga Sejahtera*

PENDAHULUAN

Kemiskinan bukanlah soal kekurangan sumber daya alam (SDA), melainkan suatu akibat digenggamnya kendali ekonomi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Rusia dan negara-negara yang masuk di dalam keanggotaan G-10 (Kreditur Ekonomi Dunia). Hal ini disebabkan oleh pengaruh kolonialisme dan berlanjut pada globalisasi yang juga merupakan suatu kekuatan besar dari abad ke 16 dan ke 19 untuk mengambil alih kekayaan dan bahan-bahan mentah dunia dan membuka pasar bagi produk-produk mereka sendiri.

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang multi dimensi. Sulit dicari solusi tepat untuk menyelesaikan seluruh masalah dan mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya ada pada dimensi moneter, melainkan juga pada persoalan terhadap akses ke infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, tenaga listrik dan lain-lain sebagainya.

Sejak era kemerdekaan sampai sekarang, pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa program dalam pengentasan kemiskinan dari program peningkatan kesejahteraan pasca kemerdekaan sampai dengan program khusus penanggulangan kemiskinan.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, mengatakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mempunyai banyak keunggulan dalam penyaluran bantuan sosial. Keunggulan Kartu keluarga

sejahtera, pertama memiliki fitur keuangan dan tabungan, sehingga dapat digunakan untuk penarikan tunai bantuan sosial (Bansos) dan transaksi pembelian barang seperti gula, LPG, dan lain-lain. Keunggulan lainnya Produk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan produk perbankan laku pandai atau LKD. Dengan sistem penyaluran yang dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indoensia secara bersama-sama. Program ini dinilai lebih efektif dan tepat sasaran dalam penyaluran Bantuan Sosial. Kartu Keluarga Sejahtera adalah inovasi sosial di era 4.0 dengan kartu tersebut penerima dapat melakukan transaksi secara online.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan (*porper*) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang dalam untuk menjamin kelangsungan hidup.

Menurut BPS, kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Kemiskinan menurut perpektif Islam, asal katanya adalah *as-sakan*, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata; "Huruf *sin*, *kaf* dan *nun* adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, seperti dikatakan, '*Sakana asy-syai'u yaskunu sukunan sakinan*', sehingga bisa diartikan orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat gerakannya menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk bergerak, atau bisa juga berarti orang yang berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada manusia (Cahaya, Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadis).

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di era global, maka sering timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan. Pertanyaan ini sering mengemuka kepermukaan karena format penanganan masalah kemiskinaan diberbagai dunia sangat bervariasi. Jika

dikaitkan dengan model sistem kesejahteraan sosial di berbagai negara, sedikitnya kita mengenal empat model sistem (yang didasarkan pada alokasi anggaran) untuk kesejahteraan sosial yakni;

Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai dari 60% dari total belanja negara.

Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai skim jaminan sosial berasal dari tiga pihak (*payroll contribution*), yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja.

Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan pengangguran. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitas sosial swasta.

Keempat, model minimal yang dianut oleh gugus negara-negara Latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Italia, Chile, Brazil) dan Asia (Korea selatan, Filipina, Srilangka). Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, dibawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Dengan catatan, kecilnya anggaran kesejahteraan sosial untuk negara-negara Asia Tenggara dan Selatan nampaknya terkait erat dengan keterbatasan anggaran negara secara keseluruhan.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Yaitu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Program bantuan sosial pangan yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program ini diberikan kepada penerima manfaat untuk mengakses bahan pangan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai instrumen yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan program Sembako kepada KPM yang memiliki fitur tabungan dan/atau uang elektronik yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan observasi peneliti mendapatkan bahwa, pendataan penerima Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Melihat dari beberapa penerima memang termasuk golongan masyarakat miskin. Penerima Kartu Keluarga Sejahtera adalah masyarakat miskin yang terdaftar di Dinas Sosial berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan telah diolah lebih lanjut oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sehingga terverifikasi nama-nama penerima Kartu keluarga sejahtera, selanjutnya pemerintah Desa melakukan pencocokan data dari data yang telah diterima dari Dinas Sosial. Selanjutnya Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaannya pada program kartu keluarga sejahtera, waktu dan lokasi distribusi KKS, serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat pelaksanaan distribusi KKS.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya mengenai permasalahan yang diteliti.

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini yaitu mengenai penanggulangan kemiskinan di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok. Data yang didapat dari para pihak yang

berhubungan dengan objek yang diteliti, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Kampala dan Masyarakat miskin di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Data yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, skripsi, ataupun dokumen lainnya yang di jadikan referensi serta informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif ini, maka dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Pengamatan langsung (observasi) adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan penulis secara langsung dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kantor Desa Kampala dan Masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Studi kepustakaan (*Library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah diatas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto "Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata".

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan (Mile dan Haberman, 1992). Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera

Membahas Tentang upaya penanggulangan kemiskinan memang erat kaitanya dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat, maka dari itu diperlukan beberapa langkah untuk mewujudkannya. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin semestinya menerapkan

strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja (*employment oriented strategy*), strategi yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan (*poverty oriented strategy*), dan strategi yang berorientasi pada pemenuhan keutuhan dasar (*basic needs oriented strategy*).

Melalui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya salah satunya yang bisa kita lihat adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera yang telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Oleh sebab itu untuk melihat upaya penanggulangan kemiskinan melalui program kartu keluarga sejahtera (KKS) memerlukan analisa yang kompeherensip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa Kampala, peneliti mendapatkan informasi, bahwa dalam proses pelaksanaan terlebih dahulu melakukan proses sosialisasi dalam hal memberikan ini informasi dalam masyarakat terkait kriteria penerima dan manfaat Kartu Keluarga Sejahtera. Bahwa Kartu keluarga Sejahtera adalah kartu yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu yang di atur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Bagi keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini, akan mendapatkan kartu Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk keuangan digital dengan pemberian simcard yang berisi emoney dalam bentuk simpanan giro pos. Setiap keluarga mendapat dana sejumlah Rp.200.000 per bulan.

Penerima Kartu Keluarga Sejahtera dapat menukar uang tersebut dengan sejumlah bahan makanan yang telah di siapkan oleh agen E-warong. Elektronik Warung Gotong Royong, yang selanjutnya disebut e-Warong, adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Kampala ada dua tempat yaitu di dusun Kampala dan dusun Pao. Pendapat yang diutarakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Drs Suardi Syuaib (58), mengatakan:

“Tempat pelaksanaan/penyaluran bantuan ada dua titik di Desa Kampala, yaitu Dusun Kampala dan Dusun Pao. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses tempatnya. Ini demi memangkas biaya yang bisa dikeluarkan masyarakat. Misalnya harus

naik mobil lagi atau bahkan jalan kaki. Jadi satu di dusun Pao dan satu di dusun Kampala.”

Adapun pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera melalui beberapa tahap, pada tahap pertama yaitu:

1. Edukasi dan sosialisasi program Sembako merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan. Pelaksana edukasi dan sosialisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah: sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya; PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2020 49
 - b. Bank Penyalur;
 - c. Pemilik/pengelola e-Warong; dan
 - d. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah.
2. Proses registrasi/distribusi KKS untuk pelaksanaan program Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan di tahun 2020. KKS yang telah dimiliki KPM dari program BPNT dan/atau PKH tetap digunakan untuk mendapatkan dan memanfaatkan dana bantuan program Sembako. Adapun tahapan persiapan pendistribusian KKS sebagai berikut:
 - a. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota dan Bank Penyalur bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan distribusi KKS serta menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan distribusi KKS kepada KPM. Lokasi distribusi KKS harus mudah dijangkau oleh KPM. Jangka waktu distribusi KKS mempertimbangkan jumlah KPM di suatu lokasi dan kondisi geografis sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
 - b. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menugaskan Pendamping Sosial Bansos Pangan dan perangkat desa/aparatur kelurahan di tiap desa/kelurahan untuk mendukung kelancaran proses distribusi KKS oleh Bank Penyalur. Apabila diperlukan, Bank Penyalur dapat merekrut tenaga tambahan untuk memperlancar proses distribusi KKS.
 - c. Sebelum pelaksanaan distribusi KKS, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaannya pada program Sembako, waktu dan lokasi distribusi KKS, serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat pelaksanaan distribusi KKS.
 - d. Sarana pemberitahuan kepada KPM dapat menggunakan media yang biasa digunakan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota,

antara lain: (i) surat yang ditujukan kepada KPM, (ii) informasi dari aparat pemerintah daerah dan Pendamping Sosial Bansos Pangan kepada KPM, dan (iii) informasi pada papan pengumuman atau sarana publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya KPM.

- e. Perangkat desa/aparat kelurahan dan Pendamping Sosial Bansos Pangan memastikan KPM hadir pada saat pelaksanaan distribusi KKS.

Proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako dilaksanakan dengan tahapan. Singkatnya, proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako digambarkan sebagai berikut:

1. Datang: KPM datang ke e-Warong dengan membawa KKS.
2. Cek: KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
3. Pilih: KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan.
4. Bayar: KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
5. Terima: KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama Sekertaris Desa Kampala Bapak Muh Arfah (36):

"Pemberian bantuan seperti ini cukup efektif, karena langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, prosesnya proses pembagiannya juga transparan karena transaksi dilakukan sendiri oleh penerima menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Capture)."

Besaran manfaat program Sembako adalah Rp200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako di e-Warong.

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako adalah:

1. Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
2. Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan.
3. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.
4. Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buahbuahan.

Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Pencegahan stunting melalui

program Sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan, bahan pangan dari program Sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir a-d di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.

Dampak Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Penanggulangan Kemiskinan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dan observasi, berikut penjelasan mengenai dampak program kartu keluarga sejahtera terhadap masyarakat miskin di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan tujuan secara umum Program Kartu Keluarga Sejahtera diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Masyarakat miskin atau Keluarga Penerima manfaat (KPM) agar bisa menunjang kebutuhan sehari-harinya. Secara umum Manfaat program Sembako adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT)
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
6. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan dengan adanya satu kartu ini para penerima manfaat PKH mulai mengenal transaksi digital yang memudahkan kehidupan mereka. Sehingga penyaluran bansos dapat memenuhi target 6T yaitu tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Kampala yakni bapak Muh Arfa terkait dengan Program KKS, dengan adanya program bantuan ini sedikit banyak telah membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang jelas pemerintah sekarang ini

berusaha semaksimal mungkin menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai macam program untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah tidak pernah berhenti untuk memberikan perhatian dalam mensejahterakan rakyatnya. Optimalisasi dan efisiensi program-program yang melindungi rakyat bawah terus digalangkan. Hal tersebut sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah sebagaimana yang terlihat dalam Program Kartu Keluarga Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan istilah kartu sembako dengan maksud tujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Peneliti berusaha melihat dampak dari program kartu keluarga sejahtera terhadap masyarakat miskin di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Dalam wawancara bersama Sekretaris Desa Kampala yaitu Bapak Muh Arfah, mengatakan:

“Program ini adalah langkah awal pemerintah yang sejalan dengan zaman saat ini. Pembagian bantuan berupa bantuan pangan non tunai melalui kartu keluarga sejahtera itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bantuan berupa bahan pokok itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Lain halnya jika berupa uang tunai, bisa saja di manfaatkan untuk hal lain.

Bantuan yang diterima masyarakat berupa kebutuhan pokok yang diharapkan bisa menunjang gizi masyarakat. Melihat kondisi saat peneliti melakukan penelitian masih dalam situasi pandemi covid-19 hal ini sangat membantu masyarakat dalam menghadapi masa sulit saat pemberlakuan pembatasan aktivitas sementara.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rosmiati:

“Allhamdulillah, sembako yang saya dapat bisa sedikit menutupi kebutuhan sehari hari, apalagi saat situasi corona suami saya tidak lagi keluar berjualan es krim, ini sangat membantu.”

Berdasarkan wawancara di atas, disimpulkan bahwa, dampak Kartu Keluarga Sejahtera sangat dirasakan terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tidak menentu, seperti buruh bangunan dan petani yang mengalami gagal panen. Bahkan ditengah pandemi pendapatan masyarakat juga terganggu, sehingga dengan adanya program ini mereka terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari hari.

Bantuan yang didapatkan oleh penerima Kartu Keluarga Sejahtera adalah, beras 10 kilogram, telur 1 rak, ikan kaleng dan abon. Bahan pokok ini diperoleh melalui kartu elektronik (e-money) yang berisi 200.000 rupiah.

Penyaluran melalui kartu elektronik diharapkan dapat transparan sehingga bantuan dapat sampai ditangan masyarakat dengan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salma, ia mengatakan:

“Program ini sangat baik, saya senang bisa menerima, karena diusia yang sudah tidak bisa bekerja. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu saya memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Sasaran program kartu keluarga sejahtera adalah kelompok masyarakat rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, orang terlantar, komunitas adat terpencil, tuna sosial, korban bencana. Mayoritas penerima kartu keluarga sejahtera didesa Kampala adalah petani yang hanya menggarap sawah orang lain.

Salah satu responden yaitu Ernawati berpendapat:

“Program ini sangat membantu, namun pemerataanya masih kurang masih banyak masyarakat tidak menerima padahal sama ji kondisinya.”

Dalam penetapan penerima Kartu Keluarga Sejahtera masih cenderung terjadi kecemburuan sosial, dikarenakan ada masyarakat yang tidak menerima tetapi memiliki kondisi yang sama dengan yang menerima. Hal ini harusnya yang perlu diperhatikan agar Program Kartu Keluarga Sejahtera bisa merata pada masyarakat miskin.

Salah satu informan yaitu Hamsiah (36) mengatakan:

“Sekarang bantuannya sudah lumayan dulu hanya beras sekarang sudah banyak macamnya, Allhamdulillah bisa mengurangi pengeluaran karena tidak perlu ke pasar lagi.”

Muliati (51) juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan ini kebutuhan rumah sudah ada penambahnya, tapi ini sudah lumayan. Allhamdulillah.

Berdasarkan Wawancara peneliti dengan masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Kampala ditarik kesimpulan bahwa Kartu Keluarga sangat membantu masyarakat miskin melalui bantuan bahan pokok yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan sehari hari. Melihat kondisi mayoritas masyarakat penerima adalah petani garap, dan dalam situasi gagal panen dan pandemi seperti saat sekarang ini Program Kartu Keluarga sejahtera mampu menjadi penyeimbang dalam melengkapi kebutuhan sehari hari. Namun dalam beberapa hal perlu dicatat bahwa dalam pendataan belum dikategorikan merata terhadap masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai telah berjalan dengan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan terkordinasi dengan baik oleh Pemerintah Desa dan seluruh element yang terlibat mulai dari tahap sosialisasi sampai proses pembagian bantuan yang telah dilakukan secara transparan. Namun dalam proses pendataan masih ada warga miskin yang tidak terdata dan tidak proporsional dikarenakan tidak memperhatikan jumlah anggota dalam rumah tangga penerima.

Dampak Program Kartu Keluarga Sejahtera bagi masyarakat miskin di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, guna meningkatkan kualitas gizi utama masyarakat agar terhindar dari malnutrisi. Kartu Keluarga Sejahtera juga sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dan gagal panen yang disebabkan oleh kemarau. Selain itu dengan adanya bantuan ini masyarakat penerima bisa mengurangi pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syafi'i (2013) tentang "Model Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. (Online). Vol. 11, No. 2 (<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/article/view/302>, diakses 28 Juni 2020).
- Anisa Rahma Dini, Yunisca Nuralisa, Abdul Halim. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik 2018. (Online). No. 9 (<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/download/17837/12721>, diakses 28 Juni 2020).
- Cahaya. (2015). Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadis: Tidak diterbitkan.
- Diah Tri Hermawati (2017) tentang "Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017. (Online). Vol. 18 No 1, (<https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosioagribis/article/download/446/pdf>, diakses 1 Juli 2020).
- Guntur, Effendi. (2009). Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian Dan Berkeadilan. Jakarta: Sagung Seto.

Gunawan, Imam. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

<https://www.bankmandiri.co.id/bansos>

<https://www.antaranews.com/berita/609142/kemensos-kartu-keluarga-sejahterapunya-banyak-keunggulan>

Machmud, Amir. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, Irfan Syauqi Beik (2015) tentang "Evaluasi Pogram Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty." (Online).(<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/347/278> , diakses 28 Juni 2020)

Nawawi, Martini, (1998). *Penelitian Terapan* Yogyakarta: Gajar mada University Press.

Nasution, S. (2001). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Buana Aksara.

Sastra, Eka. (2017). *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadalian Sosial diIndonesia*. Bandung: Expose.

Searbok, Jeremy. 2006. *Kemiskinan Global: Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*. Yogyakarta: Resist Book.

Selviana. (2016). *Bantuan Langsung Tunai 2016*. (Online). Volume III No. 2 (<https://media.neliti.com/media/publications/60945-ID-bantuan-langsung-tunai.pdf>, diakses 28 Juni 2020)

Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: R & D. Alfabet.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2019). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2011). *Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. Jakarta.